

akrual akan dapat mempengaruhi kualitas laba suatu perusahaan (Widyastuti, 2009). Oleh karena itu *discretionary accruals* dapat diartikan sebagai kebijakan akrual yang dilakukan oleh manajemen karena niat, bukan karena kondisi perusahaan yang menghendaki perubahan *judgement* dan metode akuntansi serta pergeseran biaya dan pendapatan (Sari, 2009).

Beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi dari kualitas laba, diantaranya adalah : Huifa Chen (2009) yang meneliti mengenai perbandingan kualitas laporan keuangan sebelum dan sesudah adopsi IFRS pada perusahaan di 15 negara anggota Uni Eropa (*European Union*). Huifa Chen menggunakan *the magnitude of absolute discretionary accruals* sebagai salah satu dari lima proksi kualitas laporan keuangan. Dalam penelitiannya, Huifa Chen menggunakan delapan model yang berbeda dalam mengestimasi nilai *discretionary accruals*, seperti : Cross-sectional Modified Jones Model, Cross-sectional Adapted Jones Model, dan Cross-sectional Lagged Model. Selanjutnya, penelitian Tri Widyastuti (2009) juga menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi dari kualitas laba. Penelitian ini menggunakan Modified Jones Model (1995) untuk mendeteksi tingkat manajemen laba/ *earning management*. Hal serupa juga dilakukan oleh Inna Choban Paiva (2010) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada perusahaan *go public* di Uni Eropa setelah adopsi IFRS. Dalam penelitiannya paiva juga menggunakan *cross-sectional of absolute discretionary accruals* yang diestimasi dengan Modified Jones Model (1995), sebagai proksi dalam mengukur kualitas laporan keuangan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan sebagai sampel penelitian, dimana industri perbankan memiliki karakteristik dan komponen akrual yang berbeda dengan industri lainnya. Menurut Rahmawati (2007), industri perbankan memiliki regulasi yang lebih ketat berkaitan dengan kewajiban penyediaan modal minimum atau *Capital Adequacy Requirements Ratio* (CAR). Ketatnya regulasi yang diberlakukan terhadap industri perbankan dapat mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa bank yang mendekati CAR minimum akan cenderung untuk melakukan manajemen laba dengan *overstate loan loss provisions*, *understate loan write-offs*, dan mengakui *abnormal realized gains* atas portofolio sekuritas (Rahmawati, 2007). Oleh karena itu, dalam penelitian ini nilai *discretionary accruals* diestimasi dengan menggunakan Model Beaver dan Engel (1996).

Model Beaver dan Engel (1996) telah diuji oleh Rahmawati (2007) sebagai model yang lebih tepat dan mengarah dalam mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan perbankan. Dalam penelitiannya, Rahmawati menguji model yang paling sesuai untuk mendeteksi manajemen laba pada industri perbankan publik di Indonesia. Sampel dari penelitian tersebut adalah 27 perusahaan perbankan publik yang terdaftar di BEJ dari tahun 2000 sampai 2004. Hasilnya dibuktikan bahwa model akrual khusus (Model Beaver dan Engel) adalah model yang tepat untuk mendeteksi manajemen laba pada industri perbankan, setelah dibandingkan dengan Model Jones (1991) dan Model Jones yang dimodifikasi (1991). Selain itu disebutkan pula besarnya akrual kelolaan (*discretionary*

accruals) yang diukur dengan menggunakan model akrual khusus (Model Beaver dan Engel), terbukti dapat mempengaruhi kinerja perusahaan perbankan.

Berdasarkan uraian di atas dan penelitian-penelitian terdahulu, maka variabel kualitas laba dalam penelitian ini akan diproksi dengan *discretionary accruals*, yang diestimasi dengan menggunakan Model Beaver dan Engel (1996). Menurut Rahmawati (2007), Model Beaver dan Engel (1996) merupakan model yang lebih tepat dan mengarah dalam mendeteksi manajemen laba pada perusahaan perbankan. Langkah pertama dalam menghitung nilai *discretionary accruals* menggunakan Model Beaver dan Engel (1996), adalah dengan melakukan regresi untuk mendapatkan koefisien α , α_1 , α_2 , α_3 , dan α_4 dari rumus berikut :

$$TA_{it} = \alpha + \alpha_1 CO_{it} + \alpha_2 LOAN_{it} + \alpha_3 NPA_{it} + \alpha_4 \Delta NPA_{it+1} + \varepsilon$$

Dimana,

TA_{it} : Total akrual yang dihitung berdasarkan saldo Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (*allowance for loan losses*) perusahaan di tahun t .

CO_{it} : Saldo pinjaman yang dihapusbukukan (*loan charge-offs*) perusahaan di tahun t .

$LOAN_{it}$: Pinjaman yang beredar (*loans outstanding*) perusahaan i di tahun t .

NPA_{it} : Aktiva produktif bermasalah (*non-performing assets*), yang berdasarkan tingkat kolektibilitasnya termasuk dalam kategori :

- Dalam Perhatian Khusus (DPK)
- Kurang Lancar (KL)
- Diragukan (D)
- Macet (M)

ΔNPA_{it+1} : Selisih antara *non-performing assets* perusahaan i di tahun $t + 1$ dengan *non-performing assets* perusahaan i di tahun t .

Sebelum dilakukan regresi untuk mendapatkan koefisien α , α_1 , α_2 , α_3 , dan α_4 , semua variabel (TA_{it} , CO_{it} , $LOAN_{it}$, NPA_{it} , ΔNPA_{it+1}) terlebih dahulu dideflasi dengan nilai buku ekuitas dan cadangan kerugian pinjaman. Setelah didapatkan koefisien α , α_1 , α_2 , α_3 , dan α_4 , maka kita dapat menghitung nilai *non-discretionary accruals* (NDA_{it}) untuk tiap perusahaan di tiap tahun pengamatan, dengan menggunakan rumus berikut (Rahmawati, 2007) :

$$NDA_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 CO_{it} + \alpha_2 LOAN_{it} + \alpha_3 NPA_{it} + \alpha_4 \Delta NPA_{it+1}$$

Dimana NDA_{it} adalah nilai *non-discretionary accruals* perusahaan i di tahun t . Sedangkan definisi variabel yang lain (TA_{it} , CO_{it} , $LOAN_{it}$, NPA_{it} , dan ΔNPA_{it+1}) sama dengan keterangan yang telah dikemukakan di atas.

Apabila nilai *non-discretionary accruals* (NDA_{it}) telah diketahui, maka nilai *discretionary accruals* (DA_{it}) dapat dihitung dengan mengurangkan Total

Akrua (TA_{it}) dengan *non-discretionary accruals* (NDA_{it}). Dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$DA_{it} = TA_{it} - NDA_{it}$$

Semakin tinggi nilai *discretionary accruals* (DA_{it}) mengindikasikan bahwa semakin besar terjadi praktik manajemen laba (*earning management*), atau semakin rendah kualitas laba yang terdapat dalam laporan keuangan (Paiva, 2010).

2.4. International Accounting Standards/ Standar Akuntansi Internasional

Akuntansi internasional dapat didefinisikan sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara, perbandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlainan, dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia (Sadjiarto, 1999). Sedangkan standar akuntansi dapat diartikan sebagai pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu, yang dikeluarkan oleh badan berwenang dan berlaku dalam suatu lingkungan tertentu (Chariri, 2005). Sementara Choiet *al* (2005) mendefinisikan standar akuntansi sebagai regulasi atau peraturan (seringkali termasuk hukum dan anggaran dasar) yang mengatur pengolahan laporan keuangan. Oleh karena itu, pengertian standar akuntansi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu pedoman yang mengatur proses penyusunan laporan keuangan dan merupakan kerangka akuntansi yang berlaku di seluruh dunia (berskala internasional). Standar akuntansi internasional digunakan sebagai hasil

dari (i) perjanjian internasional atau politis, (ii) kepatuhan secara sukarela, atau (iii) keputusan oleh badan pembuat standar akuntansi nasional (Choi *et al*, 2005).

International accounting standards yang sekarang lebih dikenal dengan istilah IFRS (*International Financial Reporting Standards*) merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi berskala internasional, yang berbasiskan prinsip (*principles-based reporting standards*). Perkembangan IFRS sampai dengan saat ini didorong oleh beberapa organisasi dunia seperti :

- 1) *International Accounting Standar Board (IASB)*
- 2) *Europe Commission (EC)*
- 3) *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*
- 4) *International Federation of Accountants (IFAC)*
- 5) *United Nations Intergovernmental Working Group of Expert on International Standards of Accounting and Reporting (ISAR)*
- 6) *Organization for Economic Cooperation and Development Working Group on Accounting Standards (Kelompok Kerja OECD)*

IASB mewakili kepentingan dan organisasi sektor swasta. *Europe Commission*, Kelompok Kerja OECD, dan ISAR merupakan entitas politik yang memperoleh kekuasaan melalui perjanjian internasional. IFAC merupakan lembaga akuntan internasional yang menerbitkan panduan teknis dan profesional, serta mendorong adopsi IFRS. Sedangkan IOSCO mendorong standar aturan yang

tinggi, yang diharmonisasikan untuk perolehan dan perdagangan modal lintas batas (Choi *et al*, 2005).

Pemain utama dalam penentuan standar akuntansi internasional yaitu IASB, dahulu bernama IASC (*International Accounting Standards Committee*). IASC merupakan badan independen pembuat standar akuntansi sektor swasta yang didirikan pada tahun 1973 oleh organisasi akuntansi profesional di sembilan negara di dunia. Kemudian pada bulan April tahun 2001 IASC direstrukturisasi menjadi IASB. Sebelum restrukturisasi, IASC mengeluarkan 41 standar akuntansi internasional (IAS) yang kemudian diadopsi seluruhnya oleh IASB menjadi bagian dari *International Financial Reporting Standards*. Sampai dengan saat ini IASB mewakili organisasi akuntansi dari sekitar 100 negara di dunia, sehingga dengan luasnya dasar dukungan ini IASB merupakan salah satu kekuatan pendorong utama dalam penentuan standar akuntansi internasional (Choi *et al*, 2005).

International Accounting Standards (IAS) yang terkait langsung dengan lembaga perbankan, salah satunya adalah IAS 32 dan 39. IAS 32 dan 39 merupakan standar akuntansi yang mengatur mengenai instrumen keuangan. Dimana instrumen keuangan merupakan komponen yang mendominasi aset maupun kewajiban lembaga perbankan. IAS 32 adalah standar akuntansi internasional yang mengatur mengenai pengungkapan dan penyajian instrumen keuangan, sedangkan IAS 39 adalah standar akuntansi internasional yang mengatur mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Di Indonesia IAS 32 dan 39 diadopsi ke dalam PSAK 50 (Revisi 2006) Instrumen

Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK 55 (Revisi 2006) Instrumen
Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran.

2.5. Hubungan Kualitas Laba dengan Standar Akuntansi Internasional/ *International Accounting Standards*

Hubungan antara adopsi standar akuntansi internasional (IAS/ IFRS) terhadap kualitas laporan keuangan, ataupun pengaruhnya terhadap kualitas laba, telah banyak dikemukakan oleh beberapa peneliti sebelumnya (Chen *et. al*, 2009; Ismail *et. al*, 2010; Petreski, 2006; Paiva dan lourenco, 2010; Nikoomaram dan Fathi, 2010). Namun, beberapa penelitian tersebut masih berfokus pada negara-negara di Uni Eropa (*European Union*), dan belum banyak penelitian serupa yang dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia, khususnya untuk industri perbankan di Indonesia. Hubungan antara standar akuntansi yang berlaku di suatu negara dengan kualitas laba yang dihasilkan oleh perusahaan di negara tersebut, dapat dilihat melalui beberapa pandangan berikut. Goncharov dan Zimmermann (2006) dalam Ismail (2010) menyebutkan bahwa :

The accounting standards provide different (amounts of) accounting choices, and therefore their application may result in earnings of different quality. A severe accounting choice has its costs and these costs increase with the frequency accounting choice is exercised, earnings management is expected to be more widely spread under lax regimes that leave sufficient space for making judgments.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan standar akuntansi dengan kualitas laba dapat dilihat dengan adanya pilihan kebijakan akuntansi (*accounting choices*) yang disediakan oleh standar akuntansi yang berlaku di suatu negara, dimana pilihan

kebijakan akuntansi (*accounting choices*) tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen sebagai “celah” untuk melakukan manajemen laba (*earning management*). Dikatakan bahwa standar akuntansi yang memberikan cukup celah (*sufficient space*) untuk melakukan pemilihan kebijakan, akan menyebabkan praktik manajemen laba lebih mungkin untuk dilakukan. Sehingga hal tersebut pada akhirnya akan berdampak pada kualitas dari laba yang dilaporkan.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Huifa Chen (2009), dalam penelitiannya mengenai perbedaan kualitas laporan keuangan sebelum dan sesudah adopsi *International Financial Reporting Standards* (IFRS), yang menyebutkan bahwa :

The current version of IFRS has reduced allowable accounting alternatives, limited management’s opportunistic discretion, and required accounting measurement and disclosure that can better reflect a company’s financial position and economic performance. This will lead to higher quality financial statement.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa standar akuntansi (IFRS), dapat mengurangi pilihan kebijakan akuntansi (*accounting alternatives*), membatasi kesempatan manajemen melakukan diskresi (*management’s opportunistic discretion*), dan membutuhkan pengukuran akuntansi serta pengungkapan yang lebih. Sehingga melalui hal-hal tersebut standar akuntansi (yang telah mengadopsi IFRS) akan berujung pada kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

Dalam penelitian ini, hubungan tersebut dapat dilihat dari beberapa perbedaan mendasar yang terdapat pada PSAK 50 & 55 sebelum dan setelah mengadopsi *international accounting standards*. Salah satunya adalah

diperbolehkannya penggunaan nilai wajar (*fair value*) dalam mengukur aset keuangan maupun kewajiban keuangan. Pengertian nilai wajar menurut PSAK 50 (Revisi 2006) adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (IAI, 2009). Ismail *et. al* (2010) menyebutkan bahwa :

The movement towards fair value accounting from historical-cost accounting is expected to result in financial statements that are more relevant, timely, credible and transparent. This is because fair values are likely to reflect market value; and even in the absence of market value, determination of fair values normally involves more people including accountants and managements. Any estimates and judgments made to determine fair value have to be disclosed and justified accordingly.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diharapkan bahwa dengan adanya penggunaan nilai wajar, laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi lebih relevan, tepat waktu, kredibel, dan transparan. Atau dengan kata lain penggunaan nilai wajar diharapkan akan membuat kualitas laba yang dilaporkan menjadi lebih baik.

Tetapi perlu diperhatikan bahwa hanya dengan merubah standar akuntansi semata, tidak akan dapat memastikan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan kualitas laporan keuangan atau kualitas laba khususnya, ditentukan oleh berbagai faktor seperti : ukuran perusahaan, sistem audit, persaingan pasar, kompenasi perusahaan, regulasi pasar modal setempat, sistem perpajakan, dan struktur regulasi yang ada di suatu negara (Paiva, 2010).

2.6. Perbedaan PSAK 50 & 55 Sebelum dan Sesudah Adopsi *International Accounting Standards (IAS) 32 & 39*

Pada bagian berikut akan dikemukakan beberapa perbedaan yang terdapat dalam PSAK 50 & 55 sebelum dan sesudah adanya adopsi IAS 32 & 39. Perbedaan tersebut didapatkan dengan membandingkan standar akuntansi sebelum adopsi (PSAK 50 Revisi 1998 dan PSAK 55 Revisi 1999) dengan standar akuntansi sesudah adopsi (PSAK 50 dan 55 Revisi 2006).

Tabel 1
Perbedaan PSAK 50 & 55

Perbedaan	Sebelum Adopsi IAS 32 & 39	Sesudah Adopsi IAS 32 & 39
Substansi Pengaturan Sumber : ED PSAK 50 & 55, IAI (2006)	Didasarkan pada “Jenis Instrumen” keuangan. PSAK 50 mengatur tentang akuntansi investasi efek tertentu. PSAK 55 mengatur tentang akuntansi instrumen derivatif dan aktivitas lindung nilai. Masing-masing PSAK terdapat aturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan	Didasarkan pada “Aspek Perlakuan Akuntansi”. PSAK 50 mengatur tentang penyajian dan pengungkapan untuk seluruh instrumen keuangan. PSAK 55 mengatur tentang pengakuan dan pengukuran untuk seluruh instrumen keuangan.
Definisi yang lebih luas dan kriteria yang lebih jelas	<i>Efek (security) adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.</i>	<i>Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain.</i> <i>Kewajiban keuangan adalah setiap kewajiban yang berupa : Kewajiban kontraktual</i>

<p>Sumber :</p> <p>PSAK 50 (Revisi 1998) paragraf 06</p> <p>PSAK 50 (Revisi 2006) paragraf 07</p>	<p><i>Efek utang (debt security) adalah efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek.</i></p>	<p><i>i. Untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain; atau</i></p> <p><i>ii. Untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi merugikan entitas tersebut</i></p> <p><i>Kontrak yang akan atau mungkin disesuaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas milik entitas yang bersangkutan dan merupakan suatu :</i></p> <p><i>i. Non-derivatif dalam hal entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menyerahkan suatu jumlah yang variabel (variabel number) dan instrumen ekuitas milik entitas ; atau</i></p> <p><i>ii. Derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain untuk suatu jumlah yang ditetapkan (fixed amount) dari instrumen ekuitas milik entitas.</i></p>
<p>Klasifikasi</p> <p>Sumber :</p> <p>PSAK 50 (Revisi 1998) paragraf 07</p> <p>PSAK 55 (Revisi 2006) paragraf 08</p>	<p>Instrumen keuangan diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok berikut :</p> <p>a) Dimiliki hingga jatuh tempo</p> <p>b) Diperdagangkan</p> <p>c) Tersedia untuk dijual</p>	<p>Instrumen keuangan diklasifikasikan ke dalam salah satu dari empat kategori berikut :</p> <p>a) Aset keuangan atau kewajiban keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi</p> <p>b) Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo</p> <p>c) Pinjaman yang diberikan dan piutang</p> <p>d) Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual</p>

<p>Penghentian Pengakuan (Derecognition)</p> <p>Sumber :</p> <p>PSAK 50&55 (Revisi 1998)</p> <p>PSAK 55 (Revisi 2006) <i>paragraf 17&20</i></p>	<p>Hanya sedikit sekali mengatur mengenai penghentian pengakuan.</p>	<p>Penghentian pengakuan dilakukan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau entitas mengalihkan (mentransfer) aset keuangan sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 18, 19, &20.</p> <p>Pengalihan (transfer) aset keuangan dapat dibuktikan dengan memastikan apakah telah terjadi pengalihan risiko dan manfaat atas aset tersebut. Namun jika atas pengalihan aset tersebut sebenarnya secara substansial tidak terjadi pengalihan aset atau risiko dan manfaat, maka penghentian pengakuan dapat ditentukan dengan memastikan apakah entitas masih memiliki pengendalian (control) atas aset keuangan tersebut atau tidak.</p>
<p>Pengukuran Awal (Initial Measurement)</p>	<p>Untuk kelompok instrumen keuangan :</p> <p>Diperdagangkan (<i>trading</i>) : Pengukuran awal berdasarkan biaya (<i>cost</i>). Selanjutnya berdasar nilai wajar.</p> <p>Dimiliki hingga jatuh tempo (<i>HTM</i>) : Pengukuran awal berdasarkan biaya (<i>cost</i>). Selanjutnya berdasar biaya perolehan diamortisasi.</p> <p>Tersedia untuk dijual (<i>AFS</i>) : Pengukuran awal berdasarkan biaya (<i>cost</i>).</p>	<p>Untuk kelompok instrumen keuangan :</p> <p>Dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (<i>FVTPL</i>) : Pengukuran awal berdasarkan nilai wajar (<i>fair value</i>). Selanjutnya berdasar nilai wajar.</p> <p>Dimiliki hingga jatuh tempo (<i>HTM</i>) : Pengukuran awal berdasarkan nilai wajar. Selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.</p> <p>Tersedia untuk dijual (<i>AFS</i>) : Pengukuran awal berdasarkan nilai wajar.</p>

<p>Sumber :</p> <p>PSAK 50 (Revisi 1998) <i>paragraf 08</i></p> <p>PSAK 55 (Revisi 2006) <i>paragraf 43, 46 & 47</i></p>	<p>Selanjutnya berdasar nilai wajar.</p>	<p>Selanjutnya berdasar nilai wajar.</p> <p>Pinjaman yang diberikan dan Piutang (<i>L&R</i>) : pengukuran awal berdasarkan nilai wajar. Selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.</p>
<p>Opsi Nilai Wajar (<i>Fair Value Option</i>)</p> <p>Sumber : ED PSAK 50 & 55, IAI (2006)</p>	<p>Instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar adalah instrumen keuangan dengan tujuan untuk diperdagangkan.</p>	<p>Entitas diberikan opsi untuk menetapkan aset keuangan dan kewajiban keuangan diluar untuk tujuan diperdagangkan, sebagai kelompok “diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi” (<i>FVTPL</i>)</p>
<p>Pengungkapan</p> <p>Sumber :</p> <p>PSAK 50 (Revisi 1998) <i>paragraf 21</i></p> <p>PSAK 50 (Revisi 2006) <i>paragraf 47 - 92</i></p>	<p>Mengatur pengungkapan sesuai dengan ruang lingkup setiap PSAK.</p> <p>Misalnya, untuk instrumen keuangan dalam kelompok <i>AFS</i> dan <i>HTM</i> informasi yang harus diungkapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai wajar agregat Laba belum direalisasi dari pemilikan efek Rugi belum direalisasi dari pemilikan efek Biaya perolehan 	<p>Disebutkan secara eksplisit kriteria pengungkapan untuk seluruh instrumen keuangan secara lebih rinci.</p> <p>Yang harus diungkapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Format, tempat dan kelompok instrumen keuangan Kebijakan manajemen resiko dan aktivitas lindung nilai Persyaratan, kondisi, dan kebijakan akuntansi Resiko tingkat bunga Resiko kredit Nilai wajar Pengungkapan lainnya
<p>Reklasifikasi</p>	<p>Belum diatur mengenai reklasifikasi untuk instrumen keuangan yang sebelumnya telah di reklasifikasi.</p> <p>Hanya terdapat peraturan mengenai perlakuan akuntansi atas laba (rugi) yang belum direalisasi dari perubahan kelompok investasi.</p>	<p>Entitas tidak diperkenankan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang “diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi” (<i>FVTPL</i>) Mereklasifikasi instrumen keuangan “pinjaman yang

<p>Sumber :</p> <p>PSAK 50 (Revisi 1998) <i>paragraf 16</i></p> <p>PSAK 55 (Revisi 2006) <i>paragraf 51 - 55</i></p>		<p>diberikan dan piutang” (<i>L&R</i>) dari atau ke kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo” (<i>HTM</i>) dan “diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi” (<i>FVTPL</i>)</p> <p>c) Mereklasifikasi instrumen keuangan “tersedia untuk dijual” (<i>AFS</i>) menjadi “pinjaman yang diberikan dan piutang” (<i>L&R</i>)</p>
<p>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)</p> <p>Sumber :</p> <p>SK Direksi Bank Indonesia (1998)</p> <p>Bataviase (2010)</p>	<p>Ditentukan menggunakan ekspektasi kerugian kredit (<i>expectation loss</i>)</p> <p>Ditetapkan sekurangnya sebesar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar - 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus - 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar - 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan - 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet 	<p>Ditentukan salah satunya dengan menggunakan data historis kerugian kredit yang telah terjadi (<i>incurred loss</i>) selama tiga tahun terakhir.</p>

Dari sembilan perbedaan yang telah disebutkan di atas, berikut adalah beberapa perbedaan yang dapat mempengaruhi kualitas laba dalam laporan keuangan. Perbedaan berikut diharapkan dapat mengurangi atau meminimalkan “celah” maupun alternatif pilihan kebijakan, yang biasa digunakan manajemen untuk melakukan manajemen laba, sehingga dapat mempengaruhi kualitas laba yang dihasilkan.

Pertama, pada PSAK 50 (Revisi 1998) belum diatur mengenai reklasifikasi untuk instrumen keuangan yang sebelumnya telah direklasifikasi (*paragraf 16*), atau dengan kata lain manajemen masih diperbolehkan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan yang sebelumnya telah direklasifikasi. Hal ini dapat menimbulkan “celah” bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*), berkaitan dengan keuntungan (kerugian) yang timbul akibat perubahan nilai wajar. Sebagai contoh, apabila perusahaan memiliki instrumen keuangan yang diklasifikasikan ke dalam kelompok “Dimiliki Hingga Jatuh Tempo” (*Held to Maturity*) dan nilai dari instrumen keuangan tersebut terus naik, maka perusahaan hanya dapat mengakui keuntungan (laba) yang timbul akibat perubahan nilai wajar tersebut pada saat jatuh tempo (pada saat direalisasi) (*paragraf 14*). Oleh karena itu, manajemen dapat mereklasifikasi instrumen keuangan tersebut ke dalam kelompok “Diperdagangkan” (*Trading*), sehingga keuntungan (laba) yang timbul akibat perubahan nilai wajar tersebut dapat diakui sebagai penghasilan atau sebagai laba periode sekarang (*paragraf 14*).

Pada PSAK 55 (Revisi 2006) peraturan mengenai reklasifikasi ini diatur dengan lebih ketat, sehingga diharapkan “celah” untuk melakukan manajemen laba tersebut dapat diminimalisir. Terdapat tiga aturan dalam PSAK 55 (Revisi 2006) *paragraf 51* yang mengatur hal ini :

- 1) Entitas tidak diperbolehkan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kelompok “Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi” (*FVTPL*)

- 2) Entitas tidak diperbolehkan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan “Pinjaman yang diberikan dan Piutang” (*L&R*) dari atau ke kelompok “Dimiliki Hingga Jatuh Tempo” (*HTM*) dan “Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi” (*FVTPL*)
- 3) Entitas tidak diperbolehkan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan “Tersedia untuk Dijual” (*AFS*) menjadi “Pinjaman yang diberikan dan Piutang” (*L&R*)

Oleh karena itu, dengan tidak diperbolehkannya reklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kelompok “Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi” (*FVTPL*) diharapkan “celah” tersebut dapat diminimalisir, sehingga praktik manajemen laba semakin rendah dan kualitas laba dalam laporan keuangan menjadi lebih baik.

Kedua, dasar penentuan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) yang sebelumnya disebut dengan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), dalam PSAK 50 & 55 sebelum adopsi didasarkan pada ekspektasi kerugian kredit (*expectation loss*). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no 31/148/KEP/DIR tahun 1998, cadangan pembentuk PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya 1% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar, 5% dari yang digolongkan dalam perhatian khusus, 15% dari yang digolongkan kurang lancar, dst. Oleh karena itu, perusahaan dapat mencadangkan dana lebih pada PPAP apabila merasa kegagalan kreditnya besar. Hal ini merupakan salah satu alternatif pilihan kebijakan akuntansi yang dimiliki oleh manajemen, yang dapat dijadikan “celah” untuk melakukan manajemen laba. Sebagai contoh, apabila laba

(keuntungan) perusahaan sedang tinggi pada periode sekarang, maka manajemen dapat mencadangkan laba tersebut ke dalam PPAP dengan alasan kehati-hatian. Cadangan tersebut dapat diakui sebagai laba untuk periode mendatang, dengan tujuan *income smooting* atau menghindari pajak misalnya.

Dalam PSAK 50 & 55 sesudah adopsi, dasar penentuan PPAP atau yang sekarang disebut dengan CKPN bukan lagi ekspektasi kerugian kredit, melainkan didasarkan pada data historis kerugian kredit yang telah terjadi selama tiga tahun terakhir (Bataviase, 2010). Oleh karena itu, diharapkan “celah” manajemen untuk melakukan manajemen laba melalui pencadangan tersebut dapat diminimalisir atau dikurangi.

Ketiga, dalam PSAK 50 (Revisi 2006) disyaratkan secara eksplisit tingkat pengungkapan instrumen keuangan yang lebih, bila dibandingkan dengan PSAK 50 sebelum adopsi. Pada PSAK 50 (Revisi 2006) entitas harus mengungkapkan antara lain : kebijakan manajemen resiko, sifat dan kondisi instrumen keuangan, resiko tingkat bunga, resiko kredit, serta pengungkapan lainnya yang tidak terdapat pada PSAK 50 (Revisi 1998). Penelitian Julia Halim (2005) menyebutkan tingkat pengungkapan berpengaruh signifikan negatif dengan manajemen laba, sejalan dengan perspektif *Oportunistic Earnings Management* (Halim, 2005). Oleh karena itu, diharapkan dengan tingkat pengungkapan yang lebih pada PSAK 50 & 55 sesudah adopsi, praktik manajemen laba akan semakin kecil dan kualitas laba yang dilaporkan menjadi lebih baik.

2.7. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji dampak adopsi *international accounting standard* (IAS maupun IFRS) terhadap kualitas laporan keuangan, khususnya kualitas laba. Pertama kali hubungan tersebut terlihat dari penelitian Petreski (2006) yang berjudul “*The Impact of International Accounting Standards on Firms*”. Penelitian Petreski meneliti dampak adopsi Standar Akuntansi Internasional (IAS) melalui dua dimensi, yaitu dampaknya terhadap manajemen perusahaan dan terhadap laporan keuangan perusahaan Saint-Gobain Group, khususnya pada laporan neraca dan laba rugi. Dampak adopsi standar akuntansi internasional pada laporan laba rugi ditunjukkan dengan adanya peningkatan total penjualan dan laba operasi, serta peningkatan pada laba bersih perusahaan sebesar 14,4%. Disebutkan bahwa kenaikan pada laba operasi dan laba bersih mencerminkan dampak dari adopsi IAS 16 dan IFRS 3. Yaitu terkait dengan biaya depresiasi karena penyesuaian umur ekonomis dari PPE (*Plant, Property, Equipment*) dan eliminasi amortisasi goodwill. Petreski menyimpulkan bahwa beberapa standar mempunyai dampak yang signifikan pada laporan keuangan. Dari penelitian tersebut dapat terlihat bahwa adopsi Standar Akuntansi Internasional akan berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan di suatu negara.

Selanjutnya, penelitian Nikoomaram dan Fathi (2010) yang berjudul “*The Impact of Accounting Standards on Financial Reporting Quality : Evidence From Iran*”. Penelitian ini menguji dampak penggunaan standar akuntansi yang telah diharmonisasikan dengan standar akuntansi internasional, terhadap kualitas laba

perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange (TSE). Kualitas laba di proksi dengan *Earnings Response Coefficient* (ERC) dan dianalisis dengan uji ANOVA. Hasilnya, ditemukan perbedaan tingkat ERC yang signifikan antara lima tahun sebelum dan lima tahun sesudah penerapan standar. Sehingga disimpulkan bahwa standar akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan *go public* di Iran.

Chen *et al* (2009) juga meneliti dampak adopsi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Chen membandingkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan di 15 negara anggota Uni Eropa (*European Union*), sebelum dan sesudah adanya adopsi penuh IFRS. Penelitian tersebut menggunakan lima indikator dalam mengukur kualitas laporan keuangan yaitu perataan laba (*earning smoothing*), manajemen laba menuju laba yang lebih kecil (*managing earning toward targets*), diskresi akrual (*magnitude of absolute discretionary accruals*), kualitas akrual (*accruals quality*), dan ketepatanwaktuan pengakuan kerugian (*timely loss recognition*). Pengukuran *magnitude of absolute discretionary accruals* diestimasi dengan menggunakan delapan jenis model yang berbeda, diantaranya adalah Jones model, modified Jones model, adapted Jones model, Lagged model, dst. Hasilnya, sebagian besar dari kelima indikator tersebut (*managing earning toward targets*, *magnitude of absolute discretionary accruals*, dan *accruals quality*) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan meningkat pada periode setelah adopsi IFRS (2005-2007) dibandingkan dengan periode sebelum adopsi (2000-2004). Namun demikian, Chen *et al* juga menyebutkan bahwa praktik manajemen laba masih

tetap ada dalam laporan keuangan pada periode setelah adopsi IFRS. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya indikator *earning smoothing* dan *timely loss recognition* pada periode setelah adopsi.

Terakhir, penelitian Ismail *et al* (2010) yang menguji dampak adopsi IFRS terhadap kualitas laba pada 4010 perusahaan di Malaysia. Penelitian ini membandingkan kualitas laba pada periode tiga tahun sebelum dan periode tiga tahun sesudah adopsi IFRS ke dalam standar akuntansi Malaysia (FRS). Dalam penelitiannya pengukuran kualitas laba diproksi dengan *absolute value of abnormal accruals* dan *value relevance of earnings*. Perhitungan *absolute value of abnormal accruals* dilakukan dengan menggunakan Jones Model (1991) dan Modified Jones Model (1995). Sedangkan *value relevance of earnings* dihitung dengan menggunakan Price-Earnings Model dan Return Earnings Model. Ismail *et al* menyimpulkan bahwa adopsi IFRS berdampak pada kualitas laba yang lebih baik, dibuktikan dengan tingkat manajemen laba yang lebih rendah dan nilai laba yang lebih relevan.

Bila dicermati beberapa penelitian tersebut masih terfokus pada negara-negara di Eropa (*European Union*) dan belum banyak penelitian serupa yang dilakukan di Indonesia, khususnya pada industri perbankan di Indonesia. Kalaupun ada penelitian serupa yang dilakukan di Indonesia, masih terfokus pada suatu perusahaan tertentu saja (studi kasus) dan belum banyak penelitian yang melihat dampak adopsi IFRS pada suatu industri secara keseluruhan. Padahal terdapat perbedaan mendasar antara negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia, khususnya pada aspek institusional, organisasional, dan pasar. Ismail *et*

al (2010) menyebutkan bahwa negara berkembang mempunyai kondisi pasar modal yang lebih lemah, otoritas regulasi/ peraturan yang lebih terbatas, dan kepemilikan yang lebih terpusat. Hal ini akan membawa pada tingkat asimetri informasi yang lebih besar (Ismail, 2010).

2.8. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas, dapat dilihat adanya hubungan antara adopsi standar akuntansi internasional (IAS/ IFRS) ke dalam standar akuntansi keuangan di suatu negara, dengan kualitas laba yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan di negara tersebut. Disebutkan oleh Goncharov dan Zimmermann dalam Ismail (2010), bahwa standar akuntansi memberikan berbagai pilihan kebijakan akuntansi (*accounting choices*), yang dapat dimanfaatkan oleh penyusun laporan keuangan sebagai “celah” untuk melakukan manajemen laba. Yang pada akhirnya hal tersebut akan berdampak pada kualitas laba yang dilaporkan menjadi berbeda. Dengan adanya adopsi atau harmonisasi Standar Akuntansi Internasional (IAS maupun IFRS) kedalam standar akuntansi di suatu negara, diharapkan hal tersebut dapat mengurangi “celah” pilihan kebijakan akuntansi, serta membatasi kesempatan manajemen untuk melakukan diskresi. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan posisi keuangan perusahaan dan kondisi ekonomi yang sebenarnya terjadi. Hal ini akan membawa pada kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji hubungan antara adopsi standar akuntansi internasional terhadap kualitas laba (Chen et. al, 2009; Ismail et. al, 2010; Petreski, 2006; Nikoomaram dan Fathi, 2010). Namun beberapa penelitian tersebut masih terfokus pada negara-negara maju (*European Union*), dan belum banyak penelitian serupa yang dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia, khususnya untuk industri perbankan di Indonesia. Padahal terdapat perbedaan mendasar antara negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia, khususnya pada aspek institusional, organisasional, dan pasar ekonomi (Ismail *et al*, 2010). Di Indonesia, adopsi *international accounting standards* yang terkait langsung dengan laporan keuangan lembaga perbankan dan telah ditetapkan berlaku untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010 adalah IAS 32 dan 39. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini :

H_A = Terdapat perbedaan kualitas laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sebelum dan sesudah adopsi *International Accounting Standards* (IAS) 32 & 39.